



PDIP Ngotot 14.000

Surat Suara Bermasalah

YOGYAKARTA – Tensi politik di Kota Yogyakarta pascapencoblosan 15 Februari lalu terus memanas. Walaupun ada imbauan dari Raja Keraton Yogyakarta agar semua pihak menahan diri, suhu politik masih belum bisa diredam.

PDIP masih meyakini ada sesuatu yang salah dalam penghitungan suara. Bahkan, partai pengusung calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 ini menggelar Mimbar Demokrasi di halaman posko pemenangan Imam-Fadli di Rumah Aspirasi, Jalan Melati Wetan,

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, kemarin.

Di mimbar tersebut, ratusan pendukung akan melakukan konsolidasi untuk mengawal proses rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilwali Yogyakarta 2017. PDIP pun tetap bersikukuh

ada 14.000 surat suara rusak yang berpotensi bermasalah.

Seperti diketahui, berdasarkan laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari hasil pemilihan 794 tempat pemungutan suara (TPS) didapati pasangan calon (paslon) nomor urut 1, yakni Imam Priyono-Achmad Fadli meraih 99.143 atau 49,70% suara. Sementara paslon nomor urut 2, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi meraup 100.332 suara (50,30%). Data ini sendiri belum dinyatakan resmi karena belum dihitung secara manual oleh KPU Kota Yogyakarta.

(Ke Hal 7)

(dari Hal 1

Data hanya berdasarkan scan formulir C1 dari TPS.

Sementara berdasarkan penghitungan akhir yang dilakukan oleh tim DPC PDIP Kota Yogyakarta, Imam Priyono-Achmad Fadli mendapatkan 105.915 suara (51,43%), sedangkan Haryadi-Heroe mendulang 100.027 suara atau 48,57%.

Dari kubu berseberangan, penghitungan yang dilakukan oleh tim Haryadi-Heroe di Posko Omah Putih, paslon nomor urut 2 ini meraih 99.981 suara atau 50,38%. Sementara pasangan Imam-Achmad Fadli meraih 98.463 suara 49,62%.

"Kami berkomitmen akan terus mengawal proses rekapitulasi suara hingga di Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak ada kecurangan," ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogyakarta, Fokki Ardiyanto saat memberikan testimoni-nya dalam Mimbar Demokrasi kemarin.

Pengawasan dikhususkan terhadap kotak suara yang berisi surat suara tidak sah atau rusak. Menurut dia, sekitar 14.000 surat suara rusak hasil rekapitulasi tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih berpotensi adanya perubahan. Lebih dari pengakuan sejumlah saksi paslon Imam-Fadli, bahwa saat mengawasi proses rekap di tingkat PPK, menemukan surat suara sah dalam kotak surat suara rusak.

"Tujuan kami adalah mengamankan suara rakyat dan memastikan penyelenggaraan Pilwali 2017 tak tercederai oleh proses rekapitulasi. Satu pun suara rakyat tak boleh dihilangkan secara inkonstitusional," tandasnya.

Dalam Mimbar Demokrasi, sejumlah relawan paslon Imam-Fadli yang ditugaskan menjadi saksi di TPS juga menyampaikan testimoni terkait

kondisi saat proses rekapitulasi di TPS maupun tingkat kecamatan. Salah satu saksi di Kecamatan Umbulharjo, Antoro, mengaku saat membuka sampul surat suara rusak ditemukan dua surat suara yang ternyata masuk kategori sah.

"Sempat ada perdebatan saat akan membuka kotak berisi surat suara rusak. Setelah dibuka, ternyata ada dua surat suara yang sah," ungkap Antoro.

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto mengungkap selama proses rekapitulasi di 14 PPK memang dinamikanya. Pihak yang keberatan pun diberi ruang guna menyampaikan aspirasinya secara resmi.

Wawan juga menjamin seluruh penyelenggara bekerja secara profesional, netral, dan transparan. "Kami pun harus mempertanggungjawabkan kinerja kami kepada publik. Ada prosedur yang tidak boleh kami langgar. Tapi bagaimanapun, semua keberatan tetap kami hargai," ujarnya.

ASN Terancam Dipecat tapi Lolos Pidana

Seorang oknum aparat sipil negara (ASN) Pemkot Yogyakarta selaku terlapor atas dugaan ketidaknetralan dalam Pilwali Kota Yogyakarta 2017 tidak terbukti melakukan unsur tindak pidana pemilu. Namun, sanksi administrasi masih mengancam karena Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Yogyakarta tetap mengkaji unsur pelanggaran disiplin dan kode etik ASN.

"Sentra Gakkumdu (Pegakan Hukum Terpadu) DIY menyimpulkan laporan tak memenuhi alat bukti formil terkait dugaan pidana pemilu yang ancaman hukumannya berupa kurungan dan denda. Selama batas waktu tiga hari plus dua hari, pelapor tak bisa menunjukkan kartu identitas warga Kota Yogyakarta sebagai syarat bisa diproses Gakkum-

du," kata Komisiner Panwas Yogyakarta Divisi Penindakan Pelanggaran, Pilkeska Hiranurpika saat menerima rombongan pendukung paslon Imam-Fadli di kantor Panwas Kota Yogyakarta, kemarin.

Diakuiinya, unsur tindak pidana pemilu tak bisa ditindaklanjuti, tapi pihaknya tetap memproses laporan dari Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Yogyakarta dari segi pelanggaran disiplin dan kode etik ASN. Laporan Bapilu PDIP yang dilyangkan awal pekan lalu dijadikan bekal sebagai bukti awal melakukan kajian apakah terlapor bertindak tidak netral atau sebaliknya.

"Kami bekerja profesional dan transparan. Laporan tetap kami proses, tapi statusnya kami tarik menjadi temuan panwas. Kami sudah klarifikasi ke pelapor, terlapor, dan saksi terlapor, tandasnya.

Sesuai aturan, proses kajian memakan waktu lima hari dan hasilnya baru akan keluar pada Selasa (21/2). Hasil kajian nantinya dikirim ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Komisi ASN, Ombudsman, Bawaslu DIY, Penjabat Wali Kota Yogyakarta, dan Inspektorat Yogyakarta. "Berdasar PP No 53/2010 dan UU ASN No 25/2014, mereka yang berwenang memberi sanksi pelanggaran administrasi," ucapnya.

Fokki Ardiyanto meminta agar Panwas serius memproses laporan yang mereka layangkan atas dugaan ketidaknetralan Plt Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Yunianto Dwisutono. "Ini sebagai komitmen kami mengawal demokrasi dan suara rakyat seadil-adilnya," ucap Fokki.

Untuk diketahui, Bapilu PDIP melaporkan Yunianto karena mem-posting prestasi kerjasalah satu pasangan calon dalam grup aplikasi WhatsApp UPT Malioboro. Postingan ter-

sebut dituding sebagai upaya mengarahkan memilih paslon tertentu. "Dalam undang-undang sudah jelas bahwa ASN wajib netral," tandas Fokki.

Sebelumnya, Yudianto Dwisutono selaku terlapor membantah tudingan tidak netral dalam Pilwali 2017. Dikatakannya, jika dilihat secara utuh, postingan nya di grup WA yang beranggotakan pegawai Dinas Pariwisata dan UPT Malioboro berisi seruan kepada bawahannya agar menggunakan hak pilih atau tidak golput saat pemungutan suara.

Dia menjelaskan, dalam postingan itu pihaknya tak hanya mengunggah ulasan salah satu paslon saja, tapi kedua paslon secara berimbang. Dimulai dari postingan pertama tentang ulasan pasangan calon nomor urut dua, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. Kemudian, dia juga mengunggah ulasan pasangan calon nomor urut satu, Imam Priyono-Achmad Fadli.

Sebagai penutup, dia mengajak bawahannya agar menggunakan hak pilih. Yudianto juga mengakui postingan tersebut bukan pendapat pribadinya, melainkan hanya *copy paste* dari grup WA lain. Dia sendiri mengaku telah dipanggil Penjabat Wali Kota Yogyakarta untuk diklarifikasi terkait persoalan tersebut.

Lolos dari ancaman pidana, sanksi pemecatan sudah menunggu Yudianto. Mantan Kepala Kantor Pengelola Taman Pintar ini terancam diberhentikan jika terbukti tidak netral pada Pilwali 2017.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan, yang dilakukan Yudianto merupakan pelanggaran serius terhadap UU Aparat Sipil Negara. Sesuai UU tersebut, siapa pun yang tidak netral maka sanksinya adalah dipecat secara tidak hormat.

Guna menindaklanjuti dugaan pelanggaran itu, dalam waktu dekat Komisi A akan mengundang Inspektorat DIY maupun Kota Yogyakarta, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY dan Kota Yogyakarta. Pihaknya ingin agar kasus segera tuntas dan pelaku mendapat sanksi setimpal.

Selain mengundang Inspektorat dan BKD, pihaknya juga telah memproses kasus ke Panwas. Eko, yang juga politikus PDIP itu mengungkapkan, partainya tengah mempertimbangkan untuk melaporkan ke polisi karena ada pelanggaran terhadap UU Pilkada.

"Penegakannya di panwas. Tapi kami juga tengah mempertimbangkan melaporkan kasus ini ke polisi karena ada pelanggaran UU Pilkada. ASN harus netral," katanya.

Lebih lanjut Eko menuturkan, pihaknya terus memantau setiap perkembangan terkait Pilwali Kota Yogyakarta. Terlebih, selisih suara antara dua paslon yang bertarung terpaut sangat tipis sehingga sangat rawan terjadi gesekan dan kecurangan.

Ketua tim pemenangan paslon nomor urut 1, Imam Fadli, Danang Rudyatmoko menuding pihaknya dicurangi oleh KPU, terutama karena menyalenggarakan *real count* hasil pilwali 15 Februari lalu. Hasil yang dirilis sangat merugikan paslon nomor urut 1. Padahal, mereka yakin pasangan Imam Fadli *leading* (memimpin) atas paslon nomor dua.

Dia memastikan akan menuntut keadilan atas kecurangan itu. Di sisi lain, pihaknya meminta konstituenya tetap menjaga kondusivitas pilwali. "Kami dari tim pemenangan maupun tim advokasi akan tetap memperjuangkan suara yang sudah diberikan. Termasuk suara yang dianggap tidak sah yang jumlahnya cukup mencengangkan karena mencapai 14.000 lebih," kata Danang.

● ristuhanafi/
sodik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005